



Peran Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Provinsi Jawa Timur

Kurnia Widya Angellina Hapsari¹, Singgih Manggalou²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: kurniawdyaah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 31, 2025

Kata Kunci:

Bina Keluarga Remaja (BKR), BKKBN,
Pernikahan Dini

Keywords:

Youth Family Development (BKR),
BKKBN, Early Marriage



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Fenomena *childfree* di Indonesia semakin menarik perhatian masyarakat, seiring dengan perubahan pandangan terhadap keluarga dan pola hidup. Keputusan untuk tidak memiliki anak, yang dikenal dengan istilah *childfree*, mencerminkan kesadaran akan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang memengaruhi keputusan hidup pasangan. Penurunan angka kelahiran di Indonesia, yang tercatat sebesar 4,69 juta pada 2020 dan 4,62 juta pada 2023, menunjukkan perubahan signifikan dalam preferensi keluarga. Penurunan ini membawa dampak potensial pada struktur demografi, dengan peningkatan populasi lanjut usia, menurunnya angkatan kerja, dan berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif. Selain fenomena *childfree*, pernikahan dini juga menjadi masalah serius di Indonesia, dengan banyaknya pasangan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini, seperti Program Keluarga Berencana, peningkatan usia minimal menikah, dan pemerataan kependudukan. Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, hak perempuan, dan dampak

pernikahan dini. Kelompok kegiatan ini juga melibatkan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pendewasaan usia pernikahan dan memfasilitasi komunikasi antara orang tua dan remaja. Data dari BPS menunjukkan penurunan angka pernikahan dini, meskipun belum signifikan. Penurunan angka pernikahan dini tidak hanya mencerminkan perubahan sosial, tetapi juga mengarah pada kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan mental dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kelompok kegiatan BKR dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperbaiki kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan remaja, serta menciptakan generasi yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti memaparkan hasil analisis secara deskriptif dengan tujuan agar bisa menggali lebih dalam informasi dan sumber materi terkait judul dan bahasan yang diambil.

ABSTRACT

The *childfree* phenomenon in Indonesia is increasingly attracting public attention, in line with changes in views on families and lifestyles. The decision not to have children, known as *childfree*, reflects awareness of the various social, economic and health factors that influence a couple's life decisions. The decline in the birth rate in Indonesia, which was recorded at 4.69 million in 2020 and 4.62 million in 2023, shows a significant change in family preferences. This decline has a potential impact on the demographic structure, with an increase in the elderly population, a decline in the labor force, and a reduction in the number of productive workers. Apart from the

childfree phenomenon, early marriage is also a serious problem in Indonesia, with many couples marrying under the age of 20. The government, through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), has launched various programs to overcome this problem, such as the Family Planning Program, increasing the minimum age for marriage, and population equality. The Youth Family Development Program (BKR) is an initiative that aims to reduce the rate of early marriage by providing education about reproductive health, women's rights and the impact of early marriage. This program also involves parents and the community to create awareness of the importance of maturing the age of marriage and facilitate communication between parents and teenagers. Data from BPS shows a decrease in the number of early marriages, although it is not yet significant. The decline in the rate of early marriage not only reflects social changes, but also leads to public awareness of the importance of education and mental readiness in living a family life. It is hoped that the BKR program and government policies can provide solutions to improve social welfare, education and adolescent health, as well as create a better generation ready to face future challenges. This research uses a qualitative research method where the researcher describes the results of the analysis descriptively with the aim of being able to dig deeper into the information and source material related to the title and discussion taken.

1. PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian masyarakat Indonesia. Pilihan ini memicu beragam diskusi, baik di media sosial maupun di kalangan akademis, karena dianggap menyentuh aspek nilai budaya, norma sosial, dan pandangan hidup yang berkembang di tengah masyarakat. *Childfree* merupakan keadaan dimana individu atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Semakin tingginya kesadaran terhadap berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan membuat semakin banyak orang menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai pilihan hidup yang dapat diterima (Lubis & Izzah, 2022) dalam (Nallanie & Nathanto, 2024).

Angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan yang sejalan dengan tren global. Penurunan ini memicu kekhawatiran terhadap perubahan struktur demografi Indonesia, yang berpotensi beralih menjadi populasi lanjut usia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa tingkat kelahiran dapat mengalami pertumbuhan negatif di masa mendatang. (Stevany, 2024).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelahiran pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,69 juta dan terus menurun hingga mencapai 4,62 juta pada tahun 2023 (Rizaty, 2023). Penurunan ini mencerminkan perubahan preferensi masyarakat Indonesia, yang kini lebih cenderung memilih memiliki keluarga kecil atau bahkan tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan terhadap konsep keluarga tradisional (Dewi, Listyowati, & Napitupulu, 2018). Menurut penelitian dari World Economic Forum dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), penurunan angka kelahiran membawa sejumlah dampak signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya populasi lanjut usia (*ageing population*), yang berakibat pada berkurangnya jumlah angkatan kerja dan meningkatnya tingkat ketergantungan. Dampak ini dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di masa depan, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan semakin menurun, sementara populasi lansia terus bertambah. Hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada meningkatnya biaya layanan kesehatan. Selain itu, beban masyarakat usia produktif akan bertambah karena harus menanggung biaya pensiun bagi populasi lansia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan angka pernikahan di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 2 juta pasangan yang menikah, tetapi jumlah ini terus menurun hingga hanya 1,7 juta pasangan pada tahun 2022. Selain itu, keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak (*childfree*) juga ikut berperan dalam penurunan angka pernikahan. Ketidaksiapan fisik dan mental menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan untuk tidak memiliki anak. Selain itu, faktor pribadi seperti pengalaman trauma juga memengaruhi pilihan untuk menjalani hidup *childfree* dan alasan ekonomi juga turut berperan dalam keputusan tersebut (Stevany, 2024).

Melihat fenomena ini, pemerintah Indonesia mempunyai beberapa program yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) antara lain :

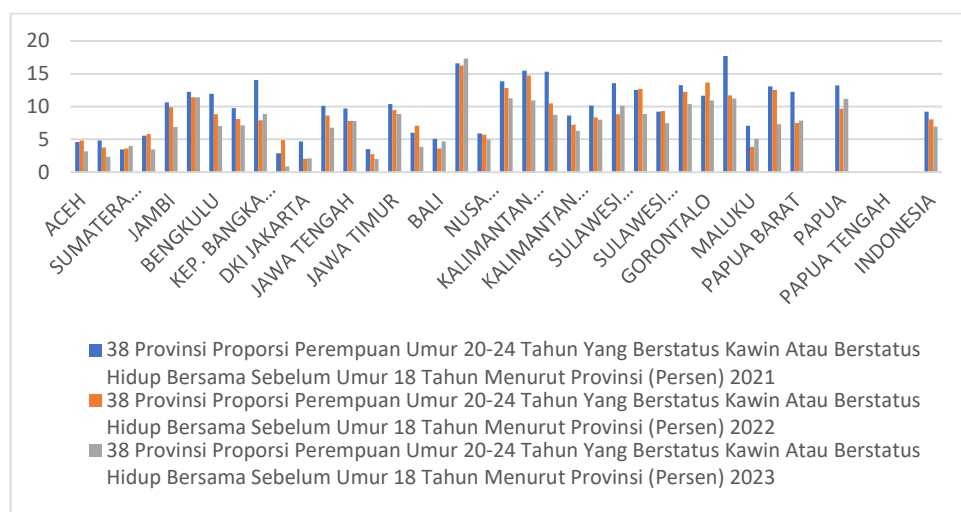
- a) Program Keluarga Berencana atau KB. Program ini ditujukan bagi pasangan yang sudah menikah, dengan slogan "Dua Anak Lebih Sehat," bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk demi menciptakan distribusi penduduk yang lebih merata di wilayah tertentu.
- b) Program Usia Minimal Menikah
Kasus pernikahan dini yang masih banyak terjadi di berbagai daerah mendorong pemerintah untuk menetapkan undang-undang terkait batas usia minimal menikah. Kebijakan ini bertujuan menekan angka pertumbuhan penduduk dan mengatasi masalah kepadatan penduduk.
- c) Pemerataan Kependudukan
Di berbagai daerah, masyarakat sering kali menghadapi keterbatasan lapangan kerja, yang memicu perpindahan tenaga kerja ke wilayah lain untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Hal ini menjadi upaya untuk menciptakan pemerataan penduduk di seluruh wilayah.
- d) Peningkatan Layanan di Bidang Pendidikan
Pendidikan memainkan peran penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Banyaknya pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama mereka yang memilih menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
- e) Peningkatan Program Wajib Belajar
Pendidikan mencakup pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan melalui proses pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Kurangnya pendidikan dapat berdampak negatif pada kemampuan seseorang di dunia kerja, sehingga penting untuk memperkuat program wajib belajar bagi masyarakat. (Watik et al., 2022)

Saat ini, Indonesia menempati posisi ketujuh dalam peringkat negara dengan angka pernikahan anak tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa situasi pernikahan dini di Indonesia sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena ini tentu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi perhatian serius. Terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, budaya, dan ekonomi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap fenomena ini. Dari sisi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua

maupun anak sering kali menyebabkan ketidaktahuan mengenai risiko yang akan muncul akibat pernikahan dini. (Khairunnisa & Nurwati, 2021)

Angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan cukup memprihatinkan. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, praktik pernikahan dini di kalangan pemuda dan remaja masih sering terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali dijadikan alasan oleh orang tua dengan tingkat pendidikan rendah, seperti hanya lulusan sekolah dasar, untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan dapat membantu meningkatkan kondisi keuangan keluarga (Muhadara et al., 2016).

Gambar 1.1 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2021-2023

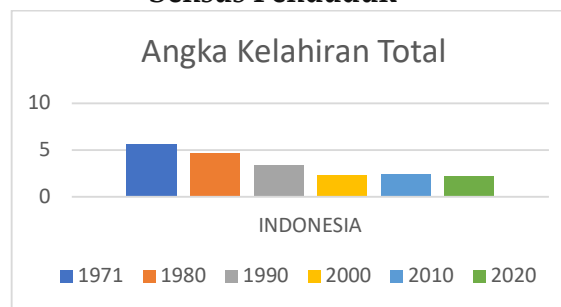


Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada gambar 1.1, bahwa persentase tren pernikahan anak Perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan meskipun penurunan tersebut masih tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang penting dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anaknya, terutama ketika pernikahan dilakukan di usia yang masih muda. Karena pernikahan dini mempunyai resiko yang serius yaitu dapat menghasilkan angka kemiskinan baru, kesehatan anak dan bayi serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang berujung pada perasaan takut, stres, dan depresi. (Putri & Nurwati, 2024)

Menurut penelitian Djamilah (2014), pernikahan dini dapat menambah beban ekonomi keluarga dan menciptakan ingkaran kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pelaku pernikahan dini yang umumnya belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan layak akibat rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, anak yang menikah dini cenderung masih bergantung pada keluarganya, terutama keluarga pihak laki-laki. Kondisi ini membuat orang tua harus menanggung beban ganda untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta anggota keluarga baru. Situasi ini pun dapat berlanjut secara turun-temurun, sehingga membentuk siklus kemiskinan.

Gambar 1.2 Angka Kelahiran Total di Indonesia Tahun 1970 – 2020 Menurut Sensus Penduduk



Sumber / Source : Sensus Penduduk (SP) dan Long Form 2020, BPS

Angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan signifikan dari tahun 1970 hingga 2020. Pada 1970, total fertility rate (TFR) tercatat sekitar 5,6 anak per wanita, mencerminkan angka kelahiran yang sangat tinggi, seiring dengan budaya keluarga besar yang masih dominan dan terbatasnya akses pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, pada 1980-an, program keluarga berencana yang digalakkan pemerintah mulai memberikan dampak positif, dengan angka kelahiran turun menjadi sekitar 4,1 anak per wanita. Penurunan ini terus berlanjut pada 1990-an dan 2000-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, terutama untuk perempuan, dan pergeseran nilai sosial mengenai peran keluarga. Pada 2020, angka kelahiran Indonesia tercatat sekitar 2,3 anak per wanita, mencerminkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin mengutamakan kualitas hidup dan pendidikan anak, meskipun tantangan dalam pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masih ada.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar bisa menggali lebih dalam informasi dan sumber materi terkait judul dan bahasan yang diambil penulis. Lokasi penelitian adalah Bidang Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (KKPS) BKKBN Provinsi Jawa Timur Jl Airlangga No. 31-33 Surabaya. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan Peran Kelompok Kegiatan BKR Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Provinsi Jawa Timur. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang didapat dengan wawancara langsung dengan penanggung jawab Kelompok Kegiatan BKR Bidang Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (KKPS) dan data sekunder yang yaitu yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber lain yang relevan. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam dan detail. Metode ini dipakai guna memahami fenomena yang kompleks dan multifaset, seperti perilaku dari manusia, persepsi, dan pengalaman setiap individu. Metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan

penelitian yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah. Tujuan penggunaan metode ini sendiri ialah untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang diteliti secara rinci dan komprehensif. Lalu tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Provinsi Jawa Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang masih sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini banyak terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia. Menurut BKKBN, pernikahan dini atau *early marriage* adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja, baik perempuan maupun laki-laki, yang berusia di bawah 20 tahun dan belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kasus pernikahan dini di Indonesia bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, karena hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan serupa dengan berbagai faktor penyebabnya. Meskipun bukan fenomena baru, angka pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya masih tergolong tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2018, jumlah pernikahan dini di Indonesia mencapai 1.184.100, dengan sebagian besar perempuan yang menikah pada usia sekitar 18 tahun. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 668.900 perempuan yang menikah di usia muda. Selain itu, selama pandemi Covid-19, angka pernikahan dini mengalami peningkatan, dengan 34.000 permohonan pernikahan dini yang diajukan pada periode Januari-Juni 2020, dan 97% di antaranya disetujui. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, yang tercatat sebanyak 23.700 permohonan (Pusparisa, 2020). Situasi ini tentu saja menimbulkan keprihatinan terkait kondisi remaja di Indonesia. (Fadilah, 2021)

BKKBN mempunyai kelompok kegiatan bernama Bina Keluarga Remaja (BKR). Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun. Bina Keluarga Remaja (BKR) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok. Oleh karena itu, Bina Keluarga Remaja (BKR) memegang peran yang sangat penting dalam menurunkan angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur. Mengingat bahwa pernikahan dini dapat berdampak serius pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial remaja, kelompok kegiatan BKR diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah fenomena tersebut. Kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dikelola oleh BKKBN memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana program ini berkontribusi dalam mengatasi masalah tersebut:

1. Edukasi dan Penyuluhan

Program BKR berfokus pada memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, serta dampak sosial, fisik, dan psikologis dari pernikahan dini. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada remaja, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat luas, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan (Fitria & Riyadh U.B, 2024). Melalui seminar, lokakarya, serta distribusi materi edukatif, program ini

berusaha mengubah paradigma masyarakat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai pilihan yang sah. Pendekatan ini melibatkan penggunaan media sosial dan platform daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas, memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh semua kalangan. Contohnya adalah dengan membuat grup WhatsApp bernama "1001 Cara Bicara," yang terdiri dari 11 grup yang masing-masing berisi Ketua BKR dan PKB Pembina dari setiap Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat juga grup bernama "Tentang Kita," yang terdiri dari 17 grup yang berisi Ketua PIK-Remaja, Ketua Insan Genre, dan Pembina PIK-Remaja dari setiap Kabupaten/Kota.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, BKR melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi yang menyentuh semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Melalui pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu PKK, dan pihak terkait lainnya, program ini berupaya untuk membangun komitmen kolektif dalam mengurangi kasus pernikahan dini (Kampung KB, 2024). BKR membentuk kader-kader di tingkat desa yang berfungsi sebagai fasilitator dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kader ini dilatih untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BKR. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat mengubah sikap dan mendukung program pencegahan pernikahan dini.

3. Fasilitasi Komunikasi Antara Orang Tua dan Remaja

Salah satu tantangan besar dalam pencegahan pernikahan dini adalah kurangnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja mengenai topik sensitif, seperti kesehatan reproduksi dan rencana masa depan. BKR menyelenggarakan program yang melibatkan orang tua dalam pelatihan keterampilan komunikasi yang efektif, membantu mereka membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak-anak mereka. Program ini mencakup teknik mendengarkan aktif, memberikan ruang bagi remaja untuk berbicara tentang aspirasi dan kekhawatiran mereka, serta mengajarkan orang tua untuk memberikan dukungan yang positif terhadap keputusan pendidikan dan karir anak-anak mereka. Dengan komunikasi yang baik, remaja lebih mungkin untuk menunda pernikahan dini dan fokus pada pengembangan diri.

4. Pemberdayaan Keluarga

BKR percaya bahwa keluarga yang kuat dan teredukasi adalah kunci untuk mencegah pernikahan dini. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga meningkatkan keterampilan orang tua dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan pendidikan, serta keterampilan *parenting* yang berbasis pada kasih sayang dan keterlibatan aktif, dapat membantu keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ekonomi dan sosial yang sering kali menjadi faktor pendorong pernikahan dini di kalangan keluarga berpendapatan rendah.

5. Pengawasan dan Dukungan Komunitas

Membangun jaringan pengawasan yang melibatkan masyarakat lokal sangat penting untuk mendukung remaja dalam menghadapi tekanan pernikahan dini. BKR berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, guru, dan anggota lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan aktif dalam mengawasi perkembangan anak-anak. Program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberi dukungan moral, serta menjadi teladan dalam mengatasi isu-isu terkait dengan pernikahan dini. Dengan adanya jejaring ini, remaja merasa lebih diberdayakan dan memiliki rasa tanggung jawab sosial, sehingga lebih mungkin menolak pernikahan dini dan memilih jalur pendidikan dan karir yang lebih baik.

6. Monitoring dan Evaluasi

Proses ini melibatkan pengumpulan data secara rutin mengenai partisipasi remaja dan orang tua dalam program, serta dampak yang ditimbulkan, seperti penurunan angka pernikahan dini (Aniar, 2019). Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa program berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Feedback dari peserta program dan masyarakat juga diambil untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan, serta menyesuaikan materi edukasi dan teknik penyuluhan agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan sistem monitoring yang jelas, BKR dapat menilai efektivitasnya dalam mengurangi pernikahan dini dan mengimplementasikan perbaikan yang dibutuhkan.

Dengan sinergi yang terjalin antara masyarakat dan stakeholder yang terlibat, diharapkan kelompok kegiatan BKR dapat berjalan dengan efektif dan dapat menurunkan angka pernikahan dini di berbagai daerah. Keberhasilan program ini memerlukan keterlibatan aktif dari setiap pihak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi remaja, guna mewujudkan generasi muda yang lebih baik dan siap menghadapi masa depan. Kegiatan BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Di samping itu, kegiatan ini diarahkan pula untuk dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota BKR.

Gambar 2.1 Cakupan Laporan Kelompok BKR Terhitung Hingga Bulan November 2024



Sumber : Data Dallap SIGA bulan November diakses pada 13 Desember 2024

Gambar di atas menunjukkan pelaporan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang telah dilakukan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Proses pelaporan ini penting untuk memantau keberhasilan kelompok kegiatan BKR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembentukan karakter remaja di daerah. Dengan adanya pelaporan tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan kelompok kegiatan BKR yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, pelaporan ini juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat, jenis kegiatan yang telah dilakukan, dan capaian yang telah tercapai dalam meningkatkan kualitas kehidupan remaja di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif di seluruh Jawa Timur.

Gambar 2.2 Data BKR Yang Terdaftar Pada SIGA

DATA BKR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024				
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (SIGA 4A)	TARGET PRO PN BKR	JUMLAH (SIGA 4B)
1	Kab. Pacitan	76	28	43
2	Kab. Ponorogo	94	39	47
3	Kab. Trenggalek	119	48	42
4	Kab. Tulungagung	117	52	57
5	Kab. Blitar	227	79	81
6	Kab. Kediri	188	46	47
7	Kab. Malang	375	82	79
8	Kab. Lumajang	210	75	74
9	Kab. Jember	197	74	94
10	Kab. Banyuwangi	75	41	39
11	Kab. Bondowoso	107	41	38
12	Kab. Situbondo	124	34	51
13	Kab. Probolinggo	121	62	72
14	Kab. Pasuruan	54	29	24
15	Kab. Sidoarjo	303	57	126
16	Kab. Mojokerto	292	67	68
17	Kab. Jombang	132	42	63
18	Kab. Nganjuk	233	64	119
19	Kab. Madiun	192	67	88
20	Kab. Magelang	239	42	60
21	Kab. Ngawi	205	51	50
22	Kab. Bojonegoro	362	59	76
23	Kab. Tuban	203	39	46
24	Kab. Lamongan	278	78	78
25	Kab. Gresik	184	36	43
26	Kab. Bangkalan	67	21	13
27	Kab. Sampang	83	19	29
28	Kab. Pamekasan	59	24	28
29	Kab. Sumenep	48	29	21
30	Kota Kediri	48	18	20
31	Kota Blitar	29	10	18
32	Kota Malang	46	31	40
33	Kota Probolinggo	98	25	31
34	Kota Pasuruan	25	22	32
35	Kota Mojokerto	36	22	33
36	Kota Madiun	32	21	28
37	Kota Surabaya	159	32	76
38	Kota Batu	54	20	19
JUMLAH		5481	1638	1993

Sumber Data : Siga Bulan November 2024, 13 Des 2024 14.30 Wib

Gambar di atas menunjukkan data BKR (Bina Keluarga Remaja) Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Dari data yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa target Program Prioritas Nasional (PRO PN) untuk seluruh Jawa Timur berjumlah 1.638 kelompok. Ini merupakan target yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan BKKBN dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Pada gambar tersebut, juga dijelaskan mengenai jumlah SIGA 4A yang merujuk pada BKR yang terdaftar dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA). SIGA 4A menunjukkan kelompok keluarga remaja yang sudah terdaftar secara resmi dalam sistem informasi tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap program-program keluarga berencana serta kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Sementara itu, jumlah SIGA 4B mengacu pada kelompok BKR yang juga terdaftar dalam SIGA, namun dengan kriteria atau fokus yang sedikit berbeda. SIGA 4B biasanya mencakup kelompok-kelompok keluarga remaja yang terlibat dalam kegiatan atau program dengan skala lebih kecil atau memiliki tujuan yang lebih

spesifik. Misalnya, SIGA 4B bisa merujuk pada kelompok-kelompok yang berfokus pada pendidikan seks, pemahaman tentang perencanaan keluarga, atau pencegahan pernikahan dini. Perbandingan antara jumlah SIGA 4A dan SIGA 4B memberikan gambaran mengenai sejauh mana program-program BKKBN telah menjangkau berbagai kelompok keluarga remaja di Provinsi Jawa Timur. Meningkatkan jumlah SIGA 4A dan 4B di seluruh Jawa Timur tentu menjadi indikator penting dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

Gambar 2.2 Data Dispensasi Perkawinan Yang Diputus di Jawa Timur Tahun 2022-2024



Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2022-2024 (Januari-September)

BerAKHLAK DP3AK_JATIM @dp3akjatim.official dp3ak.jatimprov.go.id (031) 99842454

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2022-2024 (Januari-September)

Dapat dilihat bahwa angka pernikahan di Jawa Timur menunjukkan pergeseran yang signifikan antara tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Kabupaten Malang mencatatkan jumlah pernikahan tertinggi di provinsi ini dengan 1.393 kasus. Namun, pada tahun berikutnya, 2023, Kabupaten Jember mengambil alih posisi pertama dengan jumlah 1.294 kasus pernikahan, sedikit menurun dibandingkan dengan Kabupaten Malang tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2024, terhitung dari Januari hingga September, Kota Pasuruan mencatatkan angka pernikahan tertinggi di Jawa Timur, meskipun jumlahnya hanya mencapai 671 kasus. Penurunan jumlah pernikahan di tiga daerah ini menunjukkan adanya perubahan tren yang perlu diamati lebih lanjut. Tren penurunan angka pernikahan di Jawa Timur dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal, seperti meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan mental dan fisik sebelum menikah, menjadi salah satu alasan mengapa banyak pasangan menunda atau bahkan membatalkan rencana pernikahan. Faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, tingginya biaya hidup, serta perubahan dalam norma sosial dan budaya juga turut memainkan peran penting. Terlebih lagi, adanya pilihan untuk menjalani hidup bersama tanpa menikah secara

resmi semakin berkembang, yang menunjukkan bahwa pasangan muda di Jawa Timur mungkin lebih memilih untuk fokus pada karier atau pencapaian pribadi sebelum menikah. Tren ini mengindikasikan perubahan pola hidup yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung kesiapan keluarga.

Pemerintah daerah, khususnya di Jawa Timur, terus berupaya melalui berbagai kebijakan dan penyuluhan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan memperbaiki kualitas pernikahan. Meskipun tren pernikahan menurun, angka pernikahan dini tetap menjadi perhatian utama, dengan sejumlah kabupaten/kota yang mencatatkan angka pernikahan pada usia muda yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun ada penurunan, langkah-langkah preventif tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan angka pernikahan tersebut tidak menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Fenomena childfree di Indonesia semakin menarik perhatian karena berkaitan dengan perubahan nilai budaya, norma sosial, dan pandangan hidup yang berkembang. Keputusan untuk tidak memiliki anak mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Meskipun ada penurunan angka kelahiran yang signifikan di Indonesia, ini membawa dampak terhadap struktur demografi, seperti bertambahnya populasi lansia yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini mencerminkan pergeseran preferensi dalam keluarga, di mana semakin banyak orang memilih untuk memiliki keluarga kecil atau bahkan tidak memiliki anak. Di sisi lain, angka pernikahan dini juga menunjukkan penurunan, meskipun tetap menjadi masalah yang memprihatinkan, terutama di daerah pedesaan, dengan faktor ekonomi dan pendidikan sebagai penyebab utamanya.

Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia melalui BKKBN telah mengimplementasikan beberapa program untuk mengatasi tantangan demografi dan sosial, termasuk Program Keluarga Berencana (KB) dan Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Kelompok Kegiatan BKR berperan penting dalam menurunkan angka pernikahan dini, dengan memberikan edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan bagi orang tua serta remaja mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan dampak pernikahan dini. Selain itu, program ini juga melibatkan masyarakat dan tokoh lokal untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah pernikahan dini. Dengan pendekatan yang berbasis pada komunikasi yang efektif, pemberdayaan keluarga, dan dukungan komunitas, diharapkan dapat tercapai tujuan untuk menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aniar, N. (2019). Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 117-129. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Referensi%20terdahulu/8.%20Aniar%20(2019).pdf

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fitria, L., & Riyadh U.B, A. (2024). Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1684–1697. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.995>
- Kampung KB, S. M. (2024). *Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Anak*. Kampungkb.Bkkbn.Go.Id. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/65292/intervensi/997463/peran-bina-keluarga-remaja-bkr-dalam-mencegah-pernikahan-anak>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2821>
- Muhadara, I., Parawangi, A., & Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 285–300.
- Nallanie, F., & Nathanto, F. (2024). Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat? *Syntax Idea*, 6(1), 2664–2673. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Rizaty, M. A. (2023). *Data Proyeksi Jumlah Kelahiran di Indonesia hingga 2023*. <https://DataIndonesia.Id/>. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-proyeksi-jumlah-kelahiran-di-indonesia-hingga-2023>
- Stevany, R. (2024). *Tingkat Kelahiran Penduduk Indonesia Mengalami Penurunan*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/lain-lain/824316/tingkat-kelahiran-penduduk-indonesia-mengalami-penurunan>
- Watik, D., Trisiana, A., & Novitasari, F. (2022). Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *Research Fair Unisri*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v6i1.6853>